

DISKUSI DAN KEGIATAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Jakarta, November 2019

Ippei Tsuruga, Senior Technical Officer
Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik
Organisasi Perburuhan Internasional

KERJASAMA TEKNIS ILO 2018 – 2019

PERTEMUAN

Pemerintah

- Pertemuan perdana dengan Kemnaker (Mei 2018)
- Konsultasi antar kementerian di Kemnaker (September 2018)
- Kantor Presiden (Januari 2019)
- Kemnaker (Februari 2019)
- Kemnaker (Maret 2019)
- Menteri Ketenagakerjaan (Maret 2019 - dibatalkan)
- Kemnaker (November 2019)

Pekerja

- Konsultasi nasional (September 2018)
- Pertemuan makan siang tingkat tinggi (Oktober 2018)
- Lokalah (November 2018)

Pengusaha

- Konsultasi nasional (September 2018)
- Lokalah (November 2018)

Tripartit

- LKS Tripnas (Desember 2018)

KAJIAN LATAR BELAKANG

- Laporan informasi peraturan perundang-undangan terkini di Indonesia
- Laporan misi pencari fakta dan konsultasi tentang sistem asuransi ketenagakerjaan di Indonesia
- Praktik internasional perlindungan pendapatan bagi orang yang menganggur dan implikasi bagi Indonesia
- Pertimbangan hukum, keuangan dan administratif untuk sistem asuransi pengangguran bagi Indonesia

ASURANSI KETENAGAKERJAAN DI JEPANG

Tunjangan pengangguran	Tunjangan pencari kerja (Karyawan umum)	Tunjangan dasar	Penggantian pendapatan
		Tunjangan perolehan keterampilan	Per diem, transportasi
		Tunjangan tempat tinggal	Akomodasi
		Tunjangan cedera dan sakit	Tidak bisa mencari kerja
	Tunjangan pencari kerja (Karyawan rentan)	Tunjangan pencari kerja lanjut usia	
		Tunjangan karyawan jangka pendek	
		Tunjangan pencari kerja harian	
	Tunjangan promosi ketenagakerjaan	Tunjangan promosi ketenagakerjaan	Bonus ketenagakerjaan
		Biaya relokasi	Biaya pindah
		Biaya kegiatan pencarian kerja	Transportasi, hotel
	Tunjangan pendidikan dan pelatihan		Biaya pendidikan
	Tunjangan ketenagakerjaan berkesinambungan	Tunjangan ketenagakerjaan berkesinambungan lanjut usia	Penggantian pendapatan
		Tunjangan cuti perawatan anak	Penggantian pendapatan
		Tunjangan cuti perawatan jangka panjang	Penggantian pendapatan
	Dua layanan	Program stabilisasi kerja	
Program pengembangan sumberdaya manusia			

**DAPATKAH INDONESIA
MENJALANKAN SISTEM ASURANSI
KETENAGAKERJAAN?**

YA, TETAPI TERDAPAT POIN-POIN KEPUTUSAN

Ya, karena Indonesia memiliki:

- keuangan: Asuransi ketenagakerjaan bukanlah skema mahal
- Lembaga: BPJS Ketenagakerjaan memiliki alir operasional serupa melalui JKK
- KPTKA: Pelatihan kerja dan beberapa layanan ketenagakerjaan sudah ada

Tetapi, Indonesia perlu memutuskan bagaimana cara:

- Mereformasi atau mempertahankan pesangon wajib
- Menyelaraskan AK dengan JHT, JP, JKK dan JKm
- Mengkoordinasikan tunjangan pengangguran dan KPTKA di dalam pemerintah
- Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan tripartit

LEMBAGA

PENGATURAN KELEMBAGAAN DI NEGARA LAIN

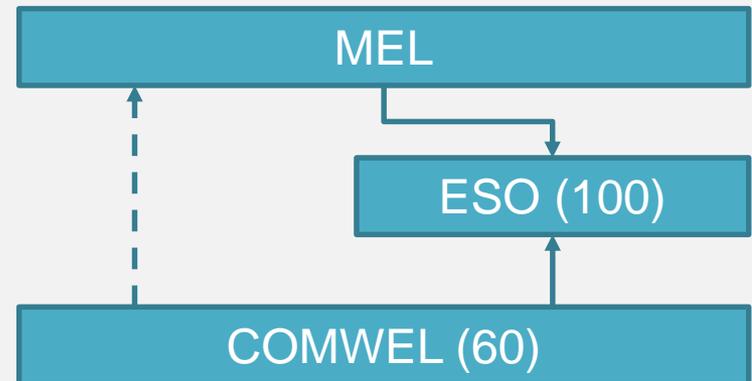
JEPANG

MHLW mengelola seluruh sistem melalui biro-biro lokalnya. Hello Work bertanggung-jawab atas klaim, penarikan iuran, pembayaran, dan semua layanan ketenagakerjaan lainnya.



KOREA

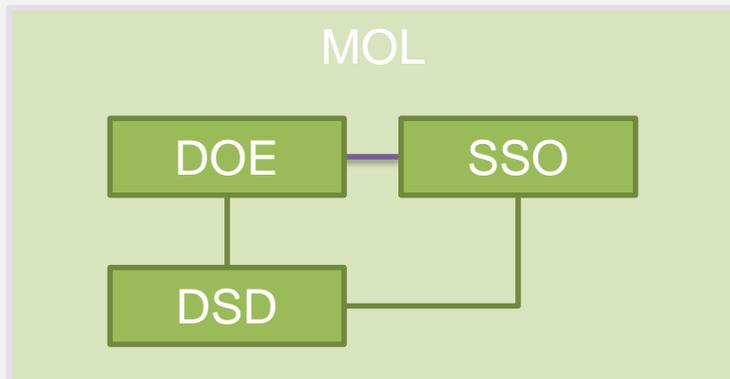
MEL mengelola seluruh sistem melalui Kantor Jaminan Ketenagakerjaan (klaim dan pembayaran) dan COMWEL (pendaftaran dan penarikan iuran). COMWEL melapor ke MEL, dan berbagi data dengan EOS.



PENGATURAN KELEMBAGAAN DI NEGARA LAIN

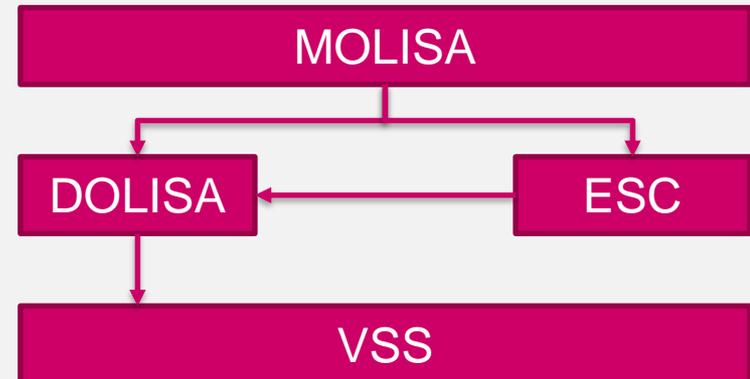
THAILAND

Department of Employment meregulasi, dan Social Security Office menangani klaim, penarikan iuran dan pembayaran. Employment Service Office-nya DOE mengkoordinasikan PES dengan Department of Skills Development.



VIETNAM

Pusat Layanan Ktenagakerjaan menerima klaim dan menghitung tunjangan; DOLISA menyetujuinya; dan VSS menarik iuran dan melakukan pembayaran.



LEMBAGA YANG ADA DI INDONESIA

Siapa akan memainkan peran apa untuk menjalankan sistem asuransi ketenagakerjaan?

- Kementerian Ketenagakerjaan
 - ✓ Direktorat tunjangan pengangguran
 - ✓ Direktorat layanan ketenagakerjaan umum
 - ✓ Direktorat pelatihan kerja
 - ✓ Kantor dinas daerah
 - Pejabat tunjangan pengangguran
 - Pejabat layanan ketenagakerjaan umum
 - Pejabat pelatihan kerja
- Balai latihan kerja
- BPJS Ketenagakerjaan
 - ✓ Kantor pusat
 - ✓ Kantor cabang
- Kementerian Koordinator
- Kantor Presiden

PERUNDANG-UNDANGAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA DI INDONESIA

Apa peraturan perundang-undangan yang perlu diamandemen dan bagaimana?

- 13/2003 UU ketenagakerjaan
- 40/2004 UU Jaminan Sosial
- 24/2011 UU BPJS
- 109/2013 Peraturan Presiden: Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- 44-46/2015 Peraturan Pemerintah: JKK, JKm, JP, JHT
- 60/2015 Peraturan Pemerintah: JHT
- 19/2015 Peraturan Menteri Tenaga Kerja: Tata Cara JHT

Terima kasih

Ippei Tsuruga – tsuruga@ilo.org